

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alting Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif* , Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Harsono Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Hastuti Hesty, 2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum penyelesaian Masalah Hak ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan pembinaan Hukum Nasional- Departemen .
- J.B Daliyo, 2002, *Eksistensi Hak masyarakat adat atas tanah setelah berlakunya UUPA*, *Justitia Et Pax, Jurnal*, Vol. 22, FH Atma Jaya, Yogyakarta.
- J.C.T Simorangkir,dkk, 2006, *Kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurnia Warman, 2009, *Pengaturan Sumber Daya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- M Rizal A. , Khairul AK, Thamrin, Suwarto. 2005 . *tanah ulayat dan keberadaan masyarakat adat*. LPNU Press, Riau.

Magnis-Suseno Frans , 2001. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.

Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*. Budi Utama, Yogyakarta.

Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

S. W. Maria Sumard jono, 1996, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Setiady Tolib, 2000, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Sodiki A, 2011, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Arena Hukum, Jakarta.

Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ter Haar, 1985, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* , Cetakan ke-8, Bandung.

Warassih Esmi , 2011. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Badan Penerbit Undip, Semarang.

Yulia, 2006, *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Sulawesi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Draft RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.